

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PORTOFOLIO

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:
Kelompok 11

Rahma Noviyana	2313031060
Annisa Yulianti	2313031062

**PROGRAM STUDI S-1 PENDIDKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

A. ARTIKEL

I. ARTIKEL 1

Identitas

Judul Artikel : Akuntansi Sektor Publik : Pengertian, Tujuan, Jenis
Nama Penulis : Vely Sia
Tahun Terbit : 2022
Alamat : <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntansi-sektor-publik-adalah/>
Artikel

Deskripsi

Definisi : Pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pembukuan, pencatatan, klasifikasi, analisis, peringkasan, serta komunikasi dan interpretasi semua informasi keuangan pemerintahan yang dilakukan secara detail dan agregat. Terdapat juga pendapat beberapa ahli terkait pengertian terhadap jenis akuntansi ini. Dwi Ratmono (2015) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai proses pengukuran, identifikasi, pencatatan, serta pelaporan seluruh transaksi keuangan dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengambil keputusan ekonomi. Erlina dkk (2015) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang berguna untuk mencatat kegiatan ekonomi suatu organisasi nirlaba atau non-profit.

Tujuan

- :
- Berguna untuk menunjukkan kepemilikan transaksi dan kesesuaian transaksi tersebut dengan aturan, hukum, dan regulasi yang ada
 - Mengukur kinerja sektor publik saat ini dan memberi informasi untuk mengendalikan manajemen operasi pemerintah yang efisien dan efektif.
 - Melakukan perencanaan operasi di masa depan dan menilai efisiensi dan efektivitas pihak yang berwenang.
 - Memastikan legalitas transaksi serta kesesuaiannya dengan UU, peraturan, dan norma yang berlaku
 - Membantu perencanaan dan pengendalian serta membantu melakukan laporan yang tepat waktu dan objektif.
 - Seorang akuntan sektor publik juga harus membantu organisasi dalam memberikan dasar dalam mengambil

keputusan penting.

- Memberikan solusi jika ada masalah dalam organisasi tersebut serta meningkatkan efisiensi manajemen

Sifat	: Sifat akuntansi sektor publik yaitu adalah memenuhi persyaratan hukum yakni rekenin pemerintahan harus siap diaudit setiap tahun. Sifat lainnya yaitu bisa melakukan fungsi penatalayanan. Maksudnya adalah pemerintah sebagai pengurus keuangan dan sumber daya negara harus bisa membuat perhitungan yang baik dalam menggunakan keuangan tersebut.
Karakteristik	: Karakteristik akuntansi untuk sektor publik berbeda dengan akuntansi untuk sektor swasta. Perbedaan yang utama yaitu dari lembaga yang menggunakannya, yaitu lembaga non profit dan pemerintahan. Karakteristik yang kedua yaitu akuntansi untuk sektor publik fokus terhadap tujuan lembaga atau organisasi. Seperti namanya, akuntansi untuk sektor publik menyediakan informasi terkait pelayanan publik untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup untuk akuntansi sektor publik merupakan semua lembaga pemerintahan dan organisasi nirlaba atau non profit. Contoh lembaga yang menggunakan jenis akuntansi ini yaitu lembaga pemerintah daerah, organisasi non profit, LSM, partai politik, yayasan, kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan perguruan tinggi.

II. ARTIKEL II

Identitas

Judul Artikel : Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia

Nama Penulis : R. Indra Sarjono Sipahutar

Tahun Terbit : 2013

Alamat Artikel : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sebelas Maret

Deskripsi

- Tujuan Teori** : Basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan saat pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Terdapat empat basis yang umum digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan, yaitu basis kas, modifikasi kas, modifikasi akrual dan akrual penuh. Basis akuntansi yang paling sering digunakan adalah basis akuntansi kas dan basis akuntansi akrual
- Penggunaan** : Penggunaan akuntansi berbasis kas memiliki berbagai risiko dan kelemahan dalam pelaksanaanya seperti terdapat risiko rentannya manipulasi arus kas, mendorong kecenderungan pemerintah untuk mengeluarkan pengeluaran sampai anggaran habis, tidak terdapatnya pengendalian aset tidak lancar (*nonkas*) secara terkoordinasi melalui akuntansi, risiko aset terabaikan atau tidak digunakan, kemungkinan peningkatan utang yang besar dan risiko kebangkrutan yang tidak dapat dideteksi secara dini pada akuntansi dan laporan keuangan. Akuntansi berbasis akrual cocok digunakan pada negara karena basis ini menyeimbangkan antara belanja modal dengan akuntansi penyusutan, mengakumulasi kewajiban pembayaran uang pensiun, mewaspadai adanya risiko utang di masa depan, kemampuan memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai keuangan negara, tidak hanya berfokus pada kas, manipulasi kas lebih mudah terdeteksi dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

- Kelebihan** : Kelebihan akuntansi berbasis akrual, antara lain:
- Memberikan gambaran bagaimana pemerintahan membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya
 - Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi segala kewajiban dan komitmen-komitmen yang ada.
 - Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya
 - Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah
 - Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah.
- Kekurangan** : Kekurangan dalam penerapan basis akrual, antara lain :
1. Biaya yang cukup besar yang harus disiapkan untuk menangani hal-hal berikut:
 - Biaya untuk penilaian asset
 - Biaya untuk penyiapan kebijakan akuntansi
 - Biaya untuk membangun sistem akuntansi termasuk membeli komputer atau peralatan lainnya untuk mendukung sistem tersebut
 - Biaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten untuk menangani akuntansi pemrintahan berbasis akrual.
 2. Basis akrual pada dasarnya didesain untuk mengukur laba sehingga kurang memberikan arti pada sektor publik atau pemerintahan
 3. Basis akrual lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas sehingga ada kemungkinan parlemen (*DPR/DPRD*) kurang memberikan perhatian dalam penelaahan sehingga

mengurangi akuntabilitas laporan keuangan tersebut

4. Memerlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan profesional (*professional judgement*) baik oleh penyedian laporan.

Tantangan

- : • Perbaikan pada sistem akuntansi dan teknologi akuntansi (*Information Technology Based System*)

Penerapan

- : • Komitmen dari pimpinan atau dukungan penerapan akuntansi berbasis akrual dari pemerintah

Basis Aktual

- : • Tersedianya sumber daya manusia khususnya tenaga akuntan yang kompeten
- : • Resistensi atau penolakan atas perubahan basis akuntansi
- : • Biaya besar yang dibutuhkan

III. ARTIKEL III

Identitas

Judul Artikel : Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Nama Penulis : Ribka Nurfalalah

Tahun Terbit : 2024

Alamat : <https://www.kompasiana.com/nadilahdahudi0744/65643be>

Artikel

Deskripsi

Definisi : Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik.

Tujuan

: Kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi:

- Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya.
- Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktik akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara lazim dan standar akuntansi keuangan sektor publik.

- Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
 - Para pemakai laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan sektor publik.
- Peranan** : Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi.
- Komponen** :
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
 - Neraca
 - Laporan Operasional (LO)
 - Laporan Arus Kas (LAK)
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Asumsi Dasar** :
 - a. Kemandirian Entitas
 - b. Asumsi Kesinambungan Entitas
 - c. Keterukuran Dalam Satuan Uang
- Kelebihan** :
 - Relevan
 - Andal
 - Dapat Dibandingkan
 - Dapat Dipahami

B. JURNAL NASIONAL

I. JURNAL NASIONAL 1

Identitas

- Judul Jurnal** : Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan
- Nama Penulis** : Nevi Costari
- Tahun Terbit** : 2021
- Nama Jurnal** : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita

Vol dan Halaman	: Vol 1, No.1 Hal 1-20
Deskripsi Tujuan	: Penelitian dilakukan guna mengutarakan fakta atau peristiwa, keadaan, kejadian atau fakta, dan variabel yang telah terjadi selama penelitian ini berjalan, menyajikan hasil penelitian dengan menyatakan apa yang sebenarnya terjadi.
Metode	: Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif
Sampel	: Seluruh warga Indonesia
Hasil Penelitian	: Di dalam akuntansi sektor publik ini, informasi akuntansi akan digunakan untuk memberikan mengenai data tentang keadaan ekonomi dan juga keadaan keuangan di dalam sektor publik kepada pelaksana baik pelaksana eksekutif, pelaksana legislatif, pelaksana yudikatif, dan juga pelaksana publik.
Tuntunan	: Laporan sebuah keuangan ini wajib di buat pada waktu yang tepat sehingga keputusan dari ekonomi, sosial dan juga politik dapat dibuat dan untuk meminimalisir keterlambatan dalam membuat sebuah keputusan tersebut. Kendala dalam waktu berhubungan dengan tenggat waktu pelaporan keuangan terbaik untuk penentuan sebuah keputusan. Masalahnya adalah semakin banyaknya suatu informasi yang dibutuhkan, maka akan semakin lama waktu yang akan dibutuhkan untuk menghasilkannya.
Kesimpulan	: Akuntansi sektor publik sangat penting untuk diterapkan karena pelaksanaan dari akuntansi sektor publik memiliki banyak dampak positif terutama mengenai kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan dari akuntansi sektor publik, semakin baik kualitas akuntansi sektor publik.

II. JURNAL NASIONAL II

Identitas

Judul Jurnal : Akuntansi Sektor Publik Perencanaan Dan Pengelolaan Dana Yayasan Widya Asi

Nama Penulis : Dipa Sanjaya

Tahun Terbit : 2017

Nama Jurnal : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika

Vol dan : Vol 7 No. 3 hal 197-208

Halaman

ISSN Jurnal : ISSN: 2599-2651

Deskripsi

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup Yayasan, bagaimana akuntabilitas sebuah yayasan, bagaimana proses penyusunan anggaran yayasan Widhya Asih, bagaimana pengelolaan dana dalam yayasan, apa dampak yang ditimbulkan apabila terdapat penyimpangan dana pada yayasan

Metode : Menggunakan metode kuantitatif

Sampel : Anak-anak yatim piatu Yayasan Widya Asih

Hasil : Yayasan Widhya Asih memanfaatkan dana yang masuk dari pemerintah maupun dari gereja untuk keperluan kebutuhan anak-anak seperti pembelian alat-alat tulis seperti buku, pensil, pulpen, dll. Selain itu bisa juga digunakan untuk membeli pakaian ataupun tas untuk digunakan ke sekolah. Selain itu juga bisa digunakan untuk pembangunan ataupun perbaikan bangunan yang ada di Yayasan Widhya Asih, seperti perbaikan bangunan yang temboknya sudah lapuk ataupun sudah rusak

Tuntunan : Pihak yayasan hanya mengutamakan kesejahteraan anak-anak di yayasan agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Anak-anak panti juga tidak selalu mengeluh apabila ada kegiatan yang tidak terealisasi akibat anggaran yang diperoleh kurang

Kesimpulan : Yayasan widya asih merupakan yayasan yang menampung anak-anak tidak memiliki orang tua dari yatim, piatu, maupun yatim piatu dan juga menampung anak dari keluarga yang kurang mampu (dititipkan). Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pihak yayasan menyesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak di yayasan itu sendiri. Walaupun sedikit dana yang diperoleh, namun pihak yayasan memiliki cara untuk mengolah sesuatu menjadi barang yang memiliki nilai jual dan dari hasil kreativitas anak - anak di dalam yayasan.

III. JURNAL NASIONAL III

Identitas

Judul Jurnal : Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik Para Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Kabupaten Gowa

Nama Penulis : Ibrahim

Tahun Terbit : 2017

Nama Jurnal : Jurnal Nobel

Vol dan : Vol 1. No. 1 Hal 533-548

Halaman

ISSN Jurnal : ISSN: 2599-2689

Deskripsi

Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kinerja organisasi publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa.

Metode : Metode yang digunakan kualitatif

Sampel : Warga Rumah sakit umum Gowa

Hasil : Menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik berpengaruh

Penelitian signifikan terhadap kinerja organisasi publik. Selain itu, akuntansi sektor publik juga erat kaitannya sebagai fungsi penyedia informasi keuangan bagi pihak eksternal dan menjadi instrumen dalam menyajikan laporan keuangan

- Tuntunan** : Akuntansi sektor publik yang sangat erat kaitannya sebagai fungsi penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal dan menjadi instrument untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal.
- Kesimpulan** : Akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi publik. Pengaruh positif dan signifikan dengan kategori rendah menunjukkan bahwa akuntansi sektor public belum berperan penting terhadap kinerja organisasi publik.

C. JURNAL INTERNASIONAL

I. JURNAL INTERNASIONAL 1

Identitas

Judul Jurnal : *Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practice.*

Nama Penulis : Mekar Meilisa Amalia

Tahun Terbit : 2023

Nama Jurnal : Es Akuntansi dan Keuangan

Vol dan : Vol. 1. No. 03. Hal 160-168

Halaman

ISSN Jurnal : 2985-7139

Deskripsi

Tujuan : Mengeksplorasi literatur tentang praktik akuntansi sektor publik dan dampaknya terhadap akuntabilitas dan transparansi

Metode : Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik untuk meninjau secara komprehensif literatur yang ada mengenai praktik akuntansi sektor publik dan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Metodologinya melibatkan pengumpulan data, data seleksi, ekstraksi data, dan analisis data menggunakan perangkat lunak VOSviewer

untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan bibliometrik.

- Konseptual** : Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan dari database akademis terkemuka, termasuk Web of Science, Scopus, dan Google Scholar. Basis data ini mencakup berbagai publikasi ilmiah di berbagai disiplin ilmu, menyediakan kumpulan data yang beragam dan komprehensif untuk dianalisis. Pencarian akan dibatasi pada publikasi berbahasa Inggris untuk memastikan konsistensi dan kemudahan ekstraksi data.
- Hasil Penelitian** : Hasil analisis VOSviewer telah memberikan wawasan berharga mengenai keadaan penelitian praktik akuntansi sektor publik terkait akuntabilitas dan transparansi. Dengan memvisualisasikan jaringan kolaboratif, mengidentifikasi publikasi yang berpengaruh, dan mengungkap tema-tema utama, penelitian ini berkontribusi terhadap upaya berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola keuangan di sektor publik.
- Klaster 1, inovasi dan Transparansi: Klaster ini terdiri dari sepuluh publikasi yang sebagian besar berfokus pada konsep inovasi dan transparansi dalam praktik akuntansi sektor publik
 - Klaster 2, Reformasi Akuntansi dan Akuntansi Akrual: Cluster 2 mencakup sembilan publikasi yang berkisar pada reformasi akuntansi dan penerapan praktik akuntansi akrual.
 - Klaster 3, Akuntansi Forensik dan Audit Internal: Cluster 3 terdiri dari sembilan publikasi yang fokus pada akuntansi forensik dan praktik audit internal di sektor publik.
 - Klaster 4, efisiensi dan sistem informasi: Cluster 4 terdiri dari empat publikasi yang berpusat pada efisiensi dan sistem informasi dalam praktik akuntansi sektor publik.

- Klaster 5: Korupsi dan audit sektor publik : Cluster 5 berisi tiga publikasi yang menekankan korupsi dan hubungannya dengan audit sektor publik. Kata kunci yang paling sering digunakan dalam kelompok ini adalah "kontribusi", "korupsi", dan "audit sektor publik".
- Klaster 6, Akuntansi Sektor Swasta: Cluster 6 diwakili oleh satu publikasi yang berfokus pada praktik akuntansi sektor swasta.
- Kemunculan Terbanyak: Akuntan (Kejadian: 70): The Istilah "akuntan" paling sering muncul dalam literatur, menunjukkan fokus yang signifikan pada peran dan tanggung jawab akuntan di sektor publik.
- Lebih sedikit kejadian: Publikasi ini kemungkinan besar mengeksplorasi bagaimana pelaporan keuangan yang transparan dan praktik pengungkapan meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas publik. Sistem informasi (Kejadian : 19): Istilah "sistem informasi" muncul dengan kemunculan yang lebih sedikit, menunjukkan relatif kurang fokus pada peran sistem informasi dalam praktik akuntansi sektor publik.

Kesimpulan : Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif literatur mengenai praktik akuntansi sektor publik, akuntabilitas, dan transparansi melalui pendekatan bibliometrik. Penelitian ini menggunakan VOSviewer untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan bibliometrik, mengungkap karya-karya berpengaruh, pola kolaborasi, dan kelompok penelitian utama. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya praktik akuntansi sektor publik dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi. Cluster yang teridentifikasi menyoroti berbagai tema, termasuk inovasi, reformasi akuntansi, akuntansi forensik, efisiensi, korupsi, dan potensi penerapan praktik akuntansi sektor swasta di sektor publik. Setiap cluster menyoroti aspek-aspek spesifik

tata kelola keuangan dan manajemen kinerja di sektor publik, sehingga memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti. Analisis kata kunci paling banyak diidentifikasi kata kunci yang sering muncul, seperti "akuntan", "reformasi sektor publik", "kinerja", dan "pelayanan", yang menunjukkan pentingnya kata-kata tersebut dalam literatur. Kata kunci ini menggarisbawahi pentingnya peran akuntan dalam pengelolaan keuangan sektor publik, fokus pada reformasi organisasi, dan penekanan pada pengukuran kinerja dan pemberian layanan. Selain itu, analisis tersebut juga menemukan kata kunci yang kemunculannya lebih sedikit, seperti "transparansi" dan "sistem informasi", yang menyoroti potensi kesenjangan penelitian dan area yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Mengatasi kesenjangan ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang betapa transparannya keuangan pelaporan dan sistem informasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi di sektor publik.

II. JURNAL INTERNASIONAL II

Identitas

Judul Jurnal : *The Fate Of Accounting For Public Governance Development.*

Nama Penulis : Kristianstad, Warsawa, Daniela Argento

Tahun Terbit : 2022

Nama Jurnal : Akuntansi, Audit & Jurnal Akuntabilitas

Vol dan : Hal 272-303

Halaman

ISSN Jurnal : 0951-3574

Deskripsi

- Tujuan** : Menjelaskan bagaimana akuntansi sektor publik telah berubah dan sedang berubah akibat perkembangan tata kelola publik.
- Metode** : Desain/metodologi/pendekatan Makalah ini melakukan tinjauan literatur tradisional berdasarkan studi terpilih di bidang akuntansi, administrasi publik dan manajemen. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana beragam bentuk tata kelola publik mempengaruhi nasib akuntansi sektor publik, termasuk akuntabilitas, pengukuran kinerja, penganggaran dan praktik pelaporan
- Hasil** : 1. Implikasinya terhadap akuntabilitas
- Penelitian** Akuntabilitas tata kelola kolaboratif mencerminkan pergeseran dari NPM “hubungan akuntabilitas yang dipahami secara sempit (misalnya keuangan atau manajerial) menuju akuntabilitas yang dipahami secara luas dan seimbang” (pelinendkk.,2018, P. 627). Akuntabilitas sosial dikaitkan dengan tata kelola kolaboratif, yang berfokus pada keterlibatan warga negara. Hal ini memungkinkan organisasi publik untuk “menerima akuntabilitas yang lebih luas atas dampak sosial yang lebih luas yang mencakup akuntabilitas atas dampak tindakan mereka terhadap organisasi lain, individu, dan lingkungan yang lebih luas” (O'Dwyer dan Unerman, 2007, P. 450). Oleh karena itu, akuntabilitas sosial terkait dengan tata kelola kolaboratif, yang jauh dari NPM, yang didasarkan pada strategi marketisasi yang menganggap masyarakat dan warga negara hanya sebagai konsumen (Diefenbach, 2009).
2. Implikasi terhadap pengukuran kinerja
- Tata kelola jaringan menekankan kinerja horizontal (yang akan) dicapai oleh organisasi dalam jaringan. Sistem PM harus berkonsentrasi pada hasil yang

komprehensif, terutama hasil dari upaya kolaboratif.

Namun, memenuhi cakupan, desain

3. Implikasinya terhadap penganggaran

Pengaruh Tata Kelola Jaringan terhadap penganggaran dapat tercermin dalam persiapan anggaran termasuk sumber daya dari berbagai aktor, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang terlibat dalam jaringan yang dikhkususkan untuk tugas, proyek, atau program publik tertentu. Dalam hal ini, pada tahun 2015, OECD menyarankan bahwa anggaran publik yang komprehensif dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keuangan publik – yang mencakup pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, dan badan-badan – dan menawarkan perspektif mengenai sektor publik secara keseluruhan.

4. Implikasi terhadap pelaporan

Tiga bentuk tata kelola publik mempengaruhi praktik akuntansi sektor publik yaitu akuntabilitas, pengukuran kinerja, penganggaran dan pelaporan. Tata Kelola Jaringan menekankan hubungan antar organisasi antara pemerintah dan aktor di sekitarnya. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi bersifat horizontal dan hibrid karena mencakup banyak aktor.

- Kesimpulan** : Dengan memanfaatkan aliran literatur yang berbeda mengenai akuntansi, administrasi publik dan manajemen, tinjauan literatur yang disajikan dalam makalah ini telah menyelidiki konsekuensinya Saat ini, tata kelola publik memiliki banyak aspek, karena berbagai aktor dan sarana digital terlibat secara aktif dalam penyampaian layanan publik. Tergantung pada fokusnya, tiga bentuk tata kelola publik diidentifikasi: Jaringan, Kolaboratif, dan Tata Kelola Digital. Tata Kelola Jaringan terutama berfokus pada berbagai organisasi yang memperluas batasan tradisional

organisasi pemerintah dan tugas mereka. Collaborative Governance berkonsentrasi pada upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sedangkan fokus pada Digital Governance adalah manfaat alat dan solusi digital untuk mengelola sektor publik. Ketiga bentuk tata kelola publik ini tidak hanya mengubah cara penyampaian layanan publik, dan memulihkan atau menciptakan nilai publik. Mereka juga mempengaruhi akuntansi sektor publik dalam berbagai arti (misalnya akuntabilitas, pengukuran kinerja, penganggaran dan pelaporan).

D. CONTOH ALPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024			31 DES 2023 REALISASI
			ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.				
	■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		32.051.000,00	40.605.116,00	126,69	92.971.787,00
	Jumlah Pendapatan		32.051.000,00	40.605.116,00	126,69	92.971.787,00
B	BELANJA	B.2.				
	■ Belanja Pegawai	B.2.1.	33.324.062.000,00	33.283.236.716,00	99,88	36.884.751.242,00
	■ Belanja Barang	B.2.2.	12.724.895.000,00	12.350.037.440,00	97,05	12.199.733.314,00
	■ Belanja Modal	B.2.3.	593.786.000,00	591.886.750,00	99,68	616.555.796,00
	Jumlah Belanja		46.642.743.000,00	46.225.160.906,00	99,10	49.701.040.352,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran

Tri Handoyo

2. Laporan Neraca

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)			
NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1.		
- Persediaan	C.1.1.	476.665.334,00	473.071.945,00
JUMLAH ASSET LANCAR		476.665.334,00	473.071.945,00
ASET TETAP	C.2.		
- Tanah	C.2.1.	90.412.497.000,00	90.412.497.000,00
- Peralatan dan Mesin	C.2.2.	14.816.659.092,00	12.192.474.122,00
- Gedung dan Bangunan	C.2.3.	23.792.019.500,00	23.396.133.500,00
- Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	108.609.532,00	108.609.532,00
- Akumulasi Penyusutan	C.2.5.	(17.830.794.317,00)	(14.859.319.382,00)
JUMLAH ASSET TETAP		111.298.990.807,00	111.250.394.772,00
ASET LAINNYA	C.3.		
- Aset Tak Berwujud	C.3.1.	197.505.000,00	197.505.000,00
- Aset Lain-Lain	C.3.2.	0,00	40.603.562,00
- Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	(197.505.000,00)	(197.505.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	40.603.562,00
JUMLAH ASSET		111.775.656.141,00	111.764.070.279,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4.		
- Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	47.934.494,00	57.995.805,00
JUMLAH KEWAJIBAN		47.934.494,00	57.995.805,00
EKUITAS			
- Ekuitas	C.5.	111.727.721.647,00	111.706.074.474,00
JUMLAH EKUITAS		111.727.721.647,00	111.706.074.474,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		111.775.656.141,00	111.764.070.279,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran

Tri Handoyo

3. Laporan Operasional

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)			
NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1		
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	39.316.616,00	47.563.600,00
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)		39.316.616,00	47.563.600,00
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
- Beban Pegawai	D.1.2.1	33.268.731.716,00	36.814.885.834,00
- Beban Persediaan	D.1.2.2	408.384.541,00	432.537.578,00
- Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	3.535.911.167,00	3.465.164.776,00
- Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	1.716.429.391,00	1.179.720.047,00
- Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	6.690.162.641,00	7.095.089.430,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	2.859.988.864,00	2.107.453.557,00
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)		48.479.608.320,00	51.095.851.222,00
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1+D.1.2)		(48.440.291.704,00)	(51.048.287.622,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASSET NON LANCAR	D.2.1		
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.1	520.500,00	33.399.999,00
- Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.2	(40.603.562,00)	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar (D.2.1.1-D.2.1.2)		(40.083.062,00)	33.399.999,00
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2.2		
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.1	768.000,00	12.008.188,00
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1-D.2.2.2)		768.000,00	12.008.188,00
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)		(39.315.062,00)	45.408.187,00
Surplus / (Defisit) Laporan Operasional (D.1+D.2)		(48.479.608.766,00)	(51.002.879.435,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran

Tri Handoyo

4. Laporan Perubahan Ekuitas

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	111.706.074.474,00	111.489.387.560,00
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	E.2	(48.479.606.766,00)	(51.002.879.435,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI)	E.3	0,00	0,00
NILAI EKUITAS			
- Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
- Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	46.225.160.906,00	49.701.040.352,00
- Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(40.605.116,00)	(82.971.787,00)
- Transfer Masuk	E.4.3	2.550.434.645,00	1.611.497.784,00
- Transfer Keluar	E.4.4	(233.736.496,00)	0,00
Jumlah Transaksi Antar Entitas		48.501.253.939,00	51.219.566.349,00
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.5)		21.647.173,00	216.686.914,00
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	E.5	111.727.721.647,00	111.706.074.474,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran

Tri Handoyo

E. ANALISIS ARTIKEL, JURNAL, DAN LAPORAN KEUANGAN

Analisis menyeluruh atas artikel, jurnal, dan laporan keuangan sektor publik mengungkapkan bahwa akuntansi sektor publik di Indonesia memiliki peranan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntansi ini didasarkan pada sistem yang berbeda dari akuntansi sektor swasta, dengan fokus utama pada pelayanan publik dan kewajiban pengelolaan dana dari sumber daya negara secara akurat dan tertib. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual modifikasi telah menjadi standar yang diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan akurat, memungkinkan pemerintah mengukur posisi keuangan dan kinerja secara nyata, tidak hanya berbasis arus kas masuk dan keluar.

Beberapa artikel dan jurnal menyoroti bahwa akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang aset dan kewajiban pemerintah, sedangkan sistem berbasis kas sering kali tidak mencerminkan kewajiban jangka panjang. Meski demikian, terdapat perbedaan implementasi antara pemerintah pusat dan daerah akibat keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur teknologi yang belum merata. Tantangan ini menyulitkan beberapa pemerintah daerah dalam mengadopsi sistem akuntansi yang kompleks dan membutuhkan komitmen kuat dari institusi untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

Laporan keuangan sektor publik yang dianalisis meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, yang secara bersama-sama menyediakan gambaran lengkap mengenai penggunaan anggaran, posisi keuangan, dan hasil operasional pemerintah. Laporan-laporan ini tidak hanya penting bagi pengambilan keputusan internal tetapi juga untuk menyampaikan informasi yang transparan kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Analisis laporan keuangan menggunakan berbagai teknik membantu mendeteksi efisiensi penggunaan dana publik dan potensi penyimpangan, yang esensial untuk pengawasan dan perbaikan berkelanjutan.

Selain aspek teknis, jurnal-jurnal yang dianalisis juga menekankan pentingnya peran akuntansi sektor publik dalam mendukung kinerja organisasi publik melalui penyediaan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan relevan. Ini penting agar pemerintah dan lembaga publik dapat mengelola sumber daya secara optimal serta memenuhi ekspektasi transparansi publik. Transformasi digital dan penguatan kapasitas SDM menjadi faktor kunci yang mendorong keberhasilan reformasi sistem akuntansi publik dan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, akuntansi sektor publik di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, terutama dengan adopsi akuntansi berbasis akrual, namun masih menghadapi kendala implementasi terutama di tingkat daerah. Pengembangan kapasitas kelembagaan, pelatihan sumber daya manusia, dan peningkatan teknologi informasi menjadi fokus utama ke depan untuk mencapai tata kelola keuangan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara teori, praktik, dan laporan keuangan sektor publik sebagai fondasi penting bagi pembangunan sistem akuntansi publik yang modern dan transparan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mekar.(2023). *Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practices. The Es Accounting and Finance.* Vol. 1, No. 03, July, pp. 160~168
- Grossi, Giuseppe. Argento, Daniela. (2022). *The Fate Of Accounting For Public Governance Development. Accounting, Auditing & Accountability Journal.* Vol. 35 No. 9
- Ibrahim.(2017). Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik Para Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Kabupaten Gowa. *Jurnal Nobel.* Vol 1 No.1
- Nevi Costari. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita.* Vol 1 No. 1
- Ribka Nurfalah. (2021). Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik. Diakses pada: Senin 18 November 2024. Dari: <https://www.kompasiana.com/nadilahdahudi0744/65643be>
- R. Indra Sarjono Sipahutar. (2013). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia. Diakses pada: Senin, 18 November 2024.
- Sanjaya, Dipa. (2017). Akuntansi Sektor Publik Perencanaan Dan Pengelolaan Dana Yayasan Widya Asih. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika.* Vol 7 No. 3
- Vely Sia. (2022). Akuntansi Sektor Publik: Pengertian, Tujuan, Jenis. Diakses pada: 18 November 2024. Dari: <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntansi-sektor-publik-adalah/>